

DILEMA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

The Chinese Dilemma in Indonesia¹

Desril Riva Shanti, Rusyanti

Balai Arkeologi Jawa Barat

Jalan Raya Cinunuk km. 17, Cileunyi, Bandung 40623

E-mail: rusyanti08@gmail.com

Abstract

The Chinese Ethnic has become part of Indonesian society since long ago with various dynamics. The changing policy in several rulers has given a great impact on their behaviorism of dilemma in social, economic, and religious than any other group in Indonesian society. How they coped with the situation is an interesting case to observe. Through several secondary sources of Chinese studies, it is found the clues of that “Middle Man” has become the cultural strategy on facing the uncertainty of political conditions in the past seen through C.A van Peursen’s view on cultural strategy approaches. The “middle man” has become the term of cultural strategy acted on facing the uncertainty of political conditions in the past. This strategy is still being challenged today since Chinese history in Indonesia had left prolonged upheavals and stigmas.

Keywords: *Tionghoa, dilemmas, Van Peursen, cultural strategy*

Abstrak

Etnis Tionghoa telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dengan berbagai dinamikanya. Perubahan kebijakan yang terjadi pada beberapa kekuasaan yang lampau telah berdampak pada perubahan sikap masyarakat keturunan etnis Cina yang mengalami dilemma baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun religi dibandingkan dengan golongan masyarakat Indonesia lainnya. Bagaimana mereka mampu menghadapi berbagai situasi tersebut merupakan kasus yang menarik untuk diobeservasi. Melalui studi pustaka dan pendekatan strategi kebudayaan Van Peursen, diketahui *middle man* menjadi strategi yang dipilih dalam menghadapi serba ketidakpastian di masa lampau. Strategi tersebut hingga kini masih menjadi tantangan mengingat hubungan sejarah masyarakat keturunan Cina di Indonesia masih meninggalkan riak-riak dan stigma yang berkepanjangan.

Kata kunci: Tionghoa, dilema, Van Peursen, strategi kebudayaan.

PENDAHULUAN

Masyarakat keturunan Cina di Indonesia telah menjadi bagian masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan di nusantara. Keberadaan dan peranan mereka telah tercatat dalam berbagai riwayat dan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Namun demikian dalam perkembangannya, masyarakat keturunan Cina di Indonesia seringkali menghadapi stigma dan prasangka negatif yang pada akhirnya menjadi dilemma yang berkepanjangan. Melalui kajian pustaka, tulisan ini mengulas kembali perihal dilema yang dihadapi masyarakat keturunan Cina di Indonesia sebagai salah satu tantangan (bencana) sosial yang

¹ Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Arkeologi “Bencana Dalam Kehidupan Manusia” tahun 2020

kompleks dan harus disikapi dengan bijak. Tulisan ini berisi pokok-pokok yang berkaitan dengan awal mula munculnya dilema yang dihadapi masyarakat keturunan Cina di Indonesia dari waktu ke waktu dan bagaimana mereka menyikapi hal tersebut dalam konteks sebagai suatu strategi kebudayaan yang lazim dilakukan baik oleh individu maupun kelompok sosial sebagai bentuk adaptasi terhadap berbagai situasi yang dihadapi sebagaimana yang disinggung oleh van Peursen, seorang profesor filsafat di Universitas Groningen dalam bukunya yang berjudul *Strategi Kebudayaan* (Peursen 1988).

Pendekatan strategi kebudayaan yang digunakan dalam tulisan ini bertujuan mbingkai topik yang dibicarakan sebagai contoh kasus yang dapat kita cermati bersama sebagai salah satu permasalahan (bencana) sosial yang ada di Indonesia. Dengan memahami sebab akibat munculnya permasalahan dan melihat respon tersebut sebagai strategi adaptasi untuk dapat *survive*, maka diharapkan masyarakat dapat melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi baik di masa lalu maupun di masa kini sebagai suatu kondisi yang kompleks dan berkaitan dengan banyak faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pemahaman adanya kompleksitas terhadap suatu masalah tertentu diharapkan dapat menjadi *filter* pemikiran untuk melihat sesuatu dengan lebih luas sehingga tidak terjebak pada pemikiran dan sikap yang negatif, *judgemental*, dan kontra produktif.

PEMBAHASAN

Awal kedatangan

Diaspora masyarakat Cina ke luar daratan Cina nusantara sudah dimulai sejak masa Dinasti Han, bahkan jauh sebelum itu sejak masa prasejarah yang terkenal dengan kebudayaan Dongson, yaitu Vietnam yang dahulu masih merupakan bagian dari wilayah Cina. Di Indonesia sendiri, kehadiran orang-orang Tionghoa periode awal (abad 4-5) masih berupa laporan perjalanan para pendeta/biksu seperti Fa-Hian yang singgah dari India hendak pulang ke Cina. Pendeta lain seperti I-Tsing juga sama. I-Tsing singgah di nusantara (Sriwijaya) dalam rangka perjalanannya menuju Nalanda, India (Setiono, 2003:19; Purwanto, 2005:39).

Permukiman Cina atau pecinan semakin jelas terlihat pada abad ke-16 atau masa ketika bangsa Eropa juga sudah hadir di nusantara. Sebelum periode itu, kehadiran orang-orang Tionghoa masih berupa koloni-koloni pedagang yang bersifat musiman (Purcell, 1997: 33 dalam Widodo, 1996). Kantung-kantung pecinan di nusantara banyak ditemukan di pantai-pantai utara Jawa dan pelabuhan-pelabuhan yang berkaitan dengan titik ekspor impor perdagangan jalur laut, seperti Banten, Batavia, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Permukiman tersebut kemudian semakin berkembang memasuki abad ke-19 hingga 20.

Orang-orang Hokkian dari Fujian merupakan suku bangsa yang pertama kali merantau ke nusantara dan jumlahnya lebih banyak daripada suku lainnya seperti Hakka/Khek dan orang Kwongfu/Kanton, Teochiu, Hailan, Hockia (asal daerah yang sama dengan Hokkian),

dan Hailokhong yang jumlahnya termasuk kecil pada masa Hindia Belanda (Purwanto, 2005: 53).

Motivasi kedatangan orang-orang Tionghoa yang awalnya hanya singgahan muhibah kagamaan berubah menjadi suatu kebutuhan dan tujuan ekonomi di samping juga karena faktor keamanan akibat konflik pergantian dinasti dan konflik Cina-Mancuria (1644) hingga meletusnya Revolusi Sun Yat Sen tahun 1911 (Haris dan Nasution 1999:17). Komoditas rempah menjadi magnet yang mendorong banyaknya orang-orang Tionghoa datang ke nusantara periode awal dengan membawa serta komoditas dari negerinya seperti sutra dan terutama keramik yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di situs-situs arkeologi di nusantara. Kronologi keramik tersebut memiliki rentang waktu dari abad 10-20. Perdagangan yang semakin terasa keuntungannya tersebut kemudian semakin meningkatkan dan memperluas peran orang-orang Tionghoa di bidang lainnya.

Pada masa kesultanan peran orang-orang Tionghoa banyak yang bertugas sebagai syahbandar dan opsir/kapitan, seperti di Batavia (Lohanda, 2001) yaitu orang yang ditunjuk untuk turut serta mengatur kelompoknya dan mengatur kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Bahkan ada pula yang menjadi bendahara kesultanan seperti Tan Sam Tjay di Cirebon (Rusyanti 2013). Pada masa kolonial Belanda, didorong oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan perkebunan dan pabrik-pabrik yang mulai gencar dibangun, kebutuhan pekerja dari Tionghoa semakin meningkat dan diiringi pula dengan kebutuhan bidang pekerjaan lain yang juga semakin bervariasi, seperti sebagai pekerja kebun, *coolie* (kuli), pedagang perantara, pedagang eceran, pedagang skala besar pedagang menengah, pengusaha ekspor impor, jasa keuangan, dan bahkan jasa hiburan (bioskop) (Heidhues 1996: 172--5; Rusyanti 2012: 91--108).

Awal dilema

Sampai tahun 1740 tidak ada konflik yang berarti yang melibatkan orang-orang Tionghoa. Di Batavia orang Tionghoa disambut dengan ramah dan menyebar ke seluruh pelosok melakukan aktivitas sehari-hari dan ekonomi. Tidak ada hukum atau peraturan yang memaksa orang-orang Tionghoa untuk tinggal terpisah. Jikapun ada pecinan pada masa itu, hal tersebut terjadi secara alami dan pilihan mereka sendiri. Konflik besar yang hingga kini menjadi titik tolak memburuknya hubungan orang-orang Tionghoa dengan Belanda dan meluas menjadi hubungan yang traumatik dan penuh prasangka antar kelompok lainnya adalah peristiwa pembunuhan orang-orang Tionghoa tahun 1740 yang dikenal dengan *chinezenmoord* (Onghokham, 1991:34).

Sepuluh ribu orang dikabarkan menjadi korban pada peristiwa 1740. Faktor yang meyulut peristiwa tersebut diduga akibat banyaknya migrasi orang-orang Tionghoa di Batavia yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga memicu kerusuhan dan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda akan potensi adanya konspirasi guna meruntuhkan kekuasaan Belanda di Batavia dengan mengingat pula bahwa kelompok masyarakat ini juga mempunyai

relasi dengan elit priyayi atau tokoh pribumi yang berpengaruh yang sewaktu-waktu dapat membelot dan berubah menjadi hubungan politik seperti mereka dengan Mataram. Peristiwa tersebut telah menyeret banyak terdakwa yang tertuduh dalam serangkaian pengadilan yang panjang, salah satu tersangka yang paling terkenal yaitu Ni Hong Kong yang dibuang ke Ambon dan hingga akhir hayatnya tetap pada pendiriannya bahwa Ia tidak terlibat (Setiono 2003).

Imbas dari peristiwa tersebut munculah berbagai batasan-batasan yang belangsung hingga 180 tahun lamanya hingga penghapusan tahun 1920 (Suryadinata 1999). Pembatasan-pembatasan tersebut meliputi:

1. *Kampung Cina/Wijkenstelsel* atau pengkhususan permukiman bagi orang-orang Tionghoa di pecinan-pecinan dan tidak boleh lagi tinggal menyebar dipelosok-pelosok karena akan menyulitkan pengontrolan. Sebelum tahun 1900, peraturan ini tidak terlalu ketat dan hanya berlaku untuk 3000 desa di Jawa namun setelah abad ke-20 peraturan tersebut lebih diperketat lagi hingga ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap kriminal. Tujuan utama *wijkenstelsel* adalah menghindari percampuran berbagai bangsa (*algamatie*) (Staatsblaad tahun 1835 No.37) dan peraturan lainnya tahun 1818, 1827, dan 1854 (staatsblaad dalam Onghokham, 2005: 41).
2. *Passenstelsel*/Surat jalan
Surat Izin perjalanan dikenakan bagi orang-orang Tionghoa yang akan keluar dari permukimannya (pecinan). *Passenstelsel* resmi dilaksanakan pada tahun 1863 penduduk yang Timur Asing yang hendak melakukan perjalanan harus mendapat surat izin yang berlaku selama satu tahun. *Passenstelsel* diduga telah diterapkan sejak tahun 1816 yang awalnya ditujukan untuk “kepentingan perdagangan, industri, dan usaha yang berguna” menjadi “untuk kepentingan keamanan” (Djie, 1995 dalam Rusyanti, 2006).
3. *Vreemde Oosterlingen*/Golongan Asia Timur
Dalam Regering Reglement tahun 1854, Belanda membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga kelompok, yaitu: Kelompok Indo Eropa, Kelompok Orang Timur Asing, dan Kelompok Indlander (bumiputera) dampak dari penggolongan tersebut berimbas pada sejumlah perundang-undangan yang berbeda (Setiono, 2003: 129--131).
4. *Landraad dan politie roll* atau Peradilan pribumi
Status hukum yang dikenakan bagi golongan Timur Asing yang disamakan dengan pribumi yang berujung pada peradilan yang sewenang-wenang karena tidak menghadirkan saksi-saksi. Jikapun ada saksi maka tidak disumpah terlebih dahulu. Lanlaars diberlakukan tahun 1848 dan baru diperbolehkan mengajukan ampun pada tahun 1908 dan dihapus tahun 1914 (Anjarwati, 1994: 73).

5. *Chinese market dan mediating role*/Spesifikasi ekonomi di bidang perdagangan dan pedagang perantara yang didukung dengan morfologi permukiman yang berada di antara kelompok permukiman Belanda dan Pribumi, yaitu “....*the walled Dutch town (a fort), the Chinese camp (market), dan sprawl of native settlements (hamlets)* (Widodo, 1994: 15).

Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama serangkaian peraturan menjadi dilema lanjutan bagi orang-orang Tionghoa/peranakan yang ada di Indonesia yang perpusat pada masalah pengaturan kewarganegaraan setelah Indonesia merdeka yang masih dibayangi kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap kemungkinan adanya dominasi “orang asing”. Peraturan pada masa Orde Lama tersebut meliputi: Peraturan undang-undang tahun 1946, Undang-undang kewarganegaraan tahun 1954, Undang-undang Dwi kewarganegaraan tahun 1955; 1958 dan Peraturan Presiden No.10 Tahun 1959. Peraturan kewarganegaraan yang mengakomodasi kewarganegaraan Indonesia bagi orang Tionghoa dengan memenuhi beberapa persyaratan, mendapat tantangan dari partai oposisi pada masa itu karena diduga akan berakibat pada banyaknya orang asing di Indonesia dan menyulitkan asimilasi.

Pada tahun 1969 perjanjian Dwi kewarganegaraan dibatalkan akibat memburuknya hubungan RI dan RRC. Hal tersebut berdampak panjang pula terhadap persepsi orang Tionghoa di Indonesia. Selepas pembatalan Dwi Kewarganegaraan, proses naturalisasi harus ditempuh dengan biaya yang mahal, panjang, dan ketat seiring juga dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perekonomian seperti pemberlakuan Sistem Benteng tahun 1950 yang dinilai diskriminatif karena lebih mengakomodasi “pribumi” sebagai importir dan pembatasan usaha penggilingan beras dan fasilitas pelabuhan, Peraturan Presiden No. 10 tentang pembatasan perdagangan eceran dan dilarangnya orang Tionghoa masuk pedesaan yang di beberapa tempat sempat menyulut konflik, dan Hukum Agraria tahun 1960 tentang pembatasan orang asing memiliki tanah. Dalam bidang pendidikan, dinamikanya lebih kompleks lagi. Tarikan pengaruh RRC terhadap Tionghoa perantauan dan persepsi dari sisi Indonesia sendiri yang masih juga sama, membuat dilema keberlangsungan sekolah-sekolah berbahasa Cina yang akhirnya banyak yang ditutup dan dinasionalisasikan (Suryadinata 1984).

Pada masa Orde Baru, kebijakan yang berkaitan dengan orang Tionghoa banyak berkaitan dengan perekonomian yang sedikit longgar. Peraturan No.10 masih dianjurkan kepada gubernur untuk dilaksanakan sendiri-sendiri secara bijaksana. Pada masa ini dilakukan upaya Tentang Kebijkasanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina yang tertulis dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967. Penataan investasi domestik masih menyebutkan persyaratan kepemilikan harus dominan pribumi namun minat menggunakan modal Tionghoa mulai muncul dengan didirikannya *Indonesian Bussiness Center (IBC)* dan *National Development Corporation (NDC)* meskipun pada praktiknya perlakukan

pembedaan masih berlangsung di dalamnya sehingga munculah praktik *Ali Baba* atau *cukongisme* yang dianggap dapat memediasi kepentingan dua belah pihak dimana pengusaha Tionghoa bekerjasama dengan pihak yang sedang berkuasa. Hubungan tersebut pun dinilai suatu yang kompleks. Orang Tionghoa harus menganggap hal tersebut merupakan cara terbaik dalam menyikapi situasi ekonomi mereka yang dirasa diskriminatif sementara penguasa memanfaatkan keahlian mereka yang memang terkenal lebih berpengalaman dari pribumi lokal.

Dalam bidang pendidikan perhatian tentang kebutuhan sekolah bagi orang asing diakomodasi dengan mendirikan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPC) meskipun pada praktiknya tetap saja menuai polemik dari golongan Tionghoa totok sendiri yang menganggap bahasa Cina yang diajarkan dinilai tidak cukup baik. Selain itu muncul pola kritik dari surat kabar *Yin-tu-ni-his-ya-jih pao* yang melihat sekolah SNPC mendorong eksklusivisme dan bertentangan dengan asas pendidikan nasional Indonesia dan yang terakhir adalah mengenai pembatasan pemakaian bahasa dan kebudayaan Cina yang telah diberlakukan sejak Orde Lama dan masih berlanjut serta pengakuan agama Buddha dan Konghucu sebagai agama yang diakui (Suryadinata 1984).

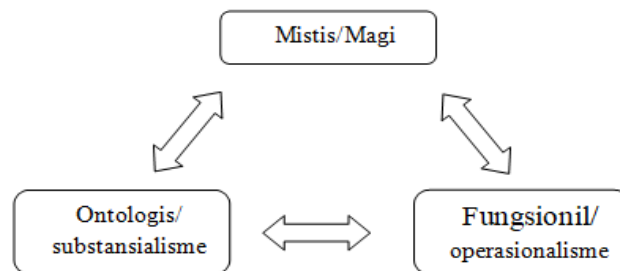
Pada masa reformasi kerentanan posisi orang-orang Tionghoa sempat menjadi pemberitaan yang mengeskakan banyak terjadi penjarahan, pemerkosaan, kerusuhan dan peningkatan prasangka dan sentimen etnis yang rawan tersulut sehingga sempat terjadi kevakuman interaksi sosial dan kelesuan ekonomi. Masa B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid status-status yang ambigu dan pembatasan-pembatasan sosial dan keagamaan perlahan dicabut dan terjadi pemulihan hak ekonomi dan beragama bagi orang-orang Tionghoa hingga masa kini.

Dilema sosial dalam konteks strategi kebudayaan

Kebudayaan memiliki banyak definisi dari yang sederhana hingga kompleks. Kebudayaan seringkali diartikan sebagai *custom* atau kebiasaan atau adat istiadat suatu kelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Atau kebudayaan adalah “seluruh *cara* kehidupan dari masyarakat yang manapun.juga melingkupi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap” (Ihromi 2006). Ada juga definisi lain yang lebih populer. E.B Taylor menyatakan kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-sitiadat, dan berbagai kemampuan lain yang didapat manusia (Harsojo, 1977:6). A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn mengumpulkan setidaknya 176 definisi tentang kebudayaan yang dikelompokkan menjadi sembilan tipe. Pendapat terbanyak menyatakan kebudayaan merupakan tindakan yang dihasilkan melalui proses belajar diajukan oleh C. Wissler, C. Kluckhohn, A. Davis, dan A. Hoebel (Koentjaraningrat, 2011:73).

Kluckhohn kemudian memerikan tujuh unsur iniversal kebudayaan yang terkenal hingga saat ini, yaitu: Bahasa, Sistem pengetahuan, Organisasi Sosial, Peralatan hidup dan teknolog, Sistem mata pencaharian hidup, Sistem Religi, dan Kesenian. Ketujuh unsur tersebut kemudian dirangkum kembali oleh J.J Hoenigman menjadi tuga unsur utama, yaitu Ide/gagasan, Perilaku/aktivitas, dan Artefak/material culture.

C.A Van Peursen seorang Profesor filsafat di Universitas Groningen, menyatakan bahwa kebudayaan memiliki tiga skema yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda dan sekaligus memiliki sisi negatifnya pula. Bagan ini dipandang sebagai “*suatu gambaran mengenai aneka macam bentuk dalam policy atau strategi*” yaitu meliputi *tahap* mistis, ontologis, dan fungsional. *Tahap* dalam koteks ini bukan berarti tahapan yang hirarkis tetapi lebih kepada ‘sifatnya’. Tahap *mistis* mengacu pada sikap manusia yang masih dipengaruhi kekuasaan/kekuatan yang berada di luar dirinya, tahap *ontologis* mengacu pada sikap manusia yang mulai mengambil jarak dan mulai meneliti keadaan di sekitarnya secara objektif, dan tahap *fungsional* mengacu pada sikap manusia yang tidak lagi begitu dipengaruhi oleh alam pikir mistis dan objektif tetapi mulai melakukan relasi-relasi baru terhadap berbagai kondisi di dalam lingkungannya dan selalu ingin mencari jalan-jalan baru terhadap permasalahan-permasalahan lama. Ketiga tahap ini memiliki sisi negatifnya masing-masing yaitu mistis memiliki sisi negatif magi, ontologis memiliki sisi negatif substansialisme, dan fungsional memiliki sisi negatif operasionalisme. Berikut skema/bagan dari Strategi kebudayaan van Peursen (Bagan 1).



Bagan 1. Skema strategi kebudayaan van Peursen
Sumber: (Peursen, 1988 skema diolah oleh penulis).

- Magi, yaitu proses menguasai orang lain dengan perantara “mistis”, konsep-konsep, ideologi-ideologi politis, dan pandangan-pandangan
- Substansialisme, yaitu usaha menjadikan manusia dan nilai-nilai menyerupai/semacam benda, barang, atau substansi-sunstansi yang terpecah-pecah
- Operasionalisme, yaitu suatu tindakan yang memperlakukan diri sendiri (dan orang lain) seperti “mirip permainan” yang sedang melakukan suatu operasi/lakon/tujuan/misi.

Peursen menyatakan bahwa fungsi bagan tersebut tersebut bukanlah sebagai tawaran suatu teori yang muluk-muluk tetapi suatu *sarana* untuk mencermati hubungan antara sikap terbuka (transendensi) dan sikap (imannensi) yang terkadang mengalami ketegangan yang melibatkan pertautan antara manusia dengan kekuasaan-kekuasaan di sekitarnya. Kebudayaan menyerupai gerak pasang surut antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan itu, mengatur ketegangan antara transendensi dan imanensi, kebijaksanaan dan strategi yang mengambil pasang surut. Hubungan manusia dan kekuasaan yang diatur oleh rencana-rencana baru (Peursen, 1988).

Skema di atas seperti yang disebut oleh Peursen merupakan *sarana* untuk mencermati adanya interaksi atau hubungan yang melibatkan antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan di sekitarnya. Dilema yang dialami etnis Tionghoa merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan adanya ketegangan hubungan antar manusia dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitarnya, yang melibatkan strategi-strategi yang diatur oleh rencana-rencana baru. Istilah-istilah pada bagan adalah konsep dasar dalam konteks filsafat yang dalam pengejawantahannya dapat ditemukan dalam berbagai contoh kasus di sekitar kita yang dapat kita cermati secara lebih sederhana. Bagaimana melihat dinamika dilema etnis Tionghoa dalam konteks tersebut?

Hubungan yang terlihat adalah bahwa sejak kedatangannya di nusantara, etnis Tionghoa sebagai pendatang telah lama melakukan interaksi dengan penguasa di tempat asal kedatangannya dan mengalami berbagai pasang surut yang kemudian dalam perjalanannya seringkali mengalami ketegangan yang sedikit berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya di Indonesia.

Bagan di atas dapat dilihat dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi pendatang Tionghoa maupun dari sisi penguasa pada masa itu. Keduanya sama-sama melakukan peran dan interaksinya terhadap satu sama lain yang sama-sama melibatkan ideologi dan pandangannya masing-masing (*magi*), melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan tertentu (*substansialisme*), dengan melakukan beberapa strategi yang bersifat konkrit (*operasional*).

Pada uraian di awal kedatangan, terlihat bahwa motif utama yang melatarbelakangi kedatangan setelah tujuan muhibah adalah aspek ekonomi, terutama keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di perantauan yang kemudian dikenal dengan istilah diaspora atau Reid menyebutnya dengan istilah *sojourners and settlers* (perantau dan pemukim) (Reid 1996) atau disebut juga dengan *Huaqiao* (Suryadinata 2007). Masyarakat Han (Cina) terkenal memiliki ideologi dan pandangan yang kuat terutama mengenai nilai-nilai, adat, budaya, dan kepercayaan sehingga golongan kelompok ini memang terlihat mencolok di antara kelompok masyarakat lainnya, sementara itu penguasa yang berhubungan dengan mereka pada masa itu baik pemerintah kolonial maupun pemerintah di awal kemerdekaan merupakan penguasa yang masih dalam taraf *menata* wilayah kekuasaan barunya. Belanda pada masa itu dalam upaya menguasai Indonesia secara absolut dalam berbagai aspeknya terutama ekonomi dan politik dan selanjutnya Orde Lama yang sedang berkutat dengan

masalah identitas kebangsaan dan nasionalisme. Keduanya mengusung "ideologi/pandangannya" yang sama-sama kuat. Begitu pula Orde Baru yang pada masa selanjutnya sedang berkonsentrasi pada kestabilan ekonomi melalui sloganya yaitu pemerataan pembangunan.

Tragedi 1740 dalam konteks ketersinggungannya yang melibatkan tiga pihak, baik etnis Tionghoa, Belanda, dan Indonesia telah meninggalkan trauma tersendiri bagi ketiga pihak yang berkaitan dengan loyalitas dan kepercayaan, sehingga dalam perjalanannya (hubungan/interaksi) ketiganya selalu dibayang-bayangi syak wasangka. Posisi etnis Tionghoa semakin dilematis ketika berkaitan pula dengan pengaruh kebijakan politik RRC terhadap warga keturunan di perantauan. Pemilihan kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa di perantauan bukanlah hal yang mudah mengingat hal tersebut berkaitan dengan masalah perubahan identitas yang bersifat mendasar (Wang Gungwu 1991).

Dalam situasi tersebut, maka masing-masing pihak demi tujuan (*ideologi*) melakukan upaya-upaya yang dinilai esensial yang setidaknya dapat mengamankan posisinya masing-masing. Hubungan tersebut adakalanya seimbang atau saling menguntungkan, namun adakalanya pula terjadi ketimpangan dan rasa diskriminasi yang tidak hanya dirasakan dari sisi etnis Tionghoa tetapi juga dari sisi warga pribumi. Pemerintah kolonial menerapkan berbagai upaya untuk mengatasi dominasi orang-orang Tionghoa agar tidak mengancam kekuasaannya (*substansial*). Pada masa Orde Lama pembatasan lebih diperkuat lagi dengan cara legislasi (peraturan-peraturan), yang kemudian masih dilanjutkan pada masa Orde Baru namun dengan sedikit "pelonggaran" yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional. Berbagai peraturan yang diberlakukan merupakan contoh-contoh *operasional* dalam melakukan strategi kebudayaan yang kemudian direspon dengan berbagai bentuk interaksi yang mengalami pasang surut, baik dalam bentuk kritik, protes/demonstrasi, hingga pembekuan hubungan dan pencabutan perjanjian/peraturan.

Suryadinata (1984) dalam bukunya melihat berbagai dinamika dan dilema yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia merupakan buah kebimbangan persepsi orang Indonesia tentang etnis Tionghoa yang telah berkembang dalam kurun waktu yang panjang sehingga diperlukan berbagai upaya agar dampaknya tidak semakin buruk bagi keberlangsungan mereka di Indonesia adalah, salah satunya dengan cara melakukan sistem *Ali Baba* (Suryadinata 1984: 131). Sistem Ali Baba dapat disebut sebagai modifikasi dari konsep *pedagang perantara*, *pedangan eceran*, atau *middle man* yang sebelumnya telah ada. *Middle man* lebih fleksibel digunakan dalam konteks sebagai respon konkrit/operasional dalam menyikapi kondisi yang serba dibatasi. Pedagang perantara berfungsi sebagai penghubung antara pedagang besar dan kecil dan atau pedagang di kota dan pedalaman, mereka merupakan pedagang yang sangat dibutuhkan perannya sejak ratusan tahun yang lalu yang kadang disebut juga dengan "tangan kedua". Raffles menyatakan orang Tionghoa merupakan hayat dan jiwa perdagangan di Hindia Belanda (Die 1979) dengan prosentase sebagai

pedagang kelahiran lokal sebanyak 45,51% dan 32,17% kelahiran luar negeri menurut data statistik tahun 1930 (Suryadinata 1984).

Ciri khas yang dijadikan strategi dari sisi penguasa dalam mengatur pergerakan “*middle man*” dari dulu hingga kini adalah dengan melakukan berbagai pembatasan dalam bentuk regulasi dan perundang-undangan (*de jure*), seperti pemilihan kewarganegaraan, pemberlakuan aturan-aturan perdangan, dan pembatasan penggunaan simbol-simbol (aksara, vihara, kuncir, pengantian nama toko, dan nama individu dan pelarangan ciri arsitektur), pelarangan imlek, pelarangan bahasa lokal, pembatasan jenis usaha ekonomi, dan lain sebagainya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selama stigma masa lalu masih menjadi sejarah yang traumatis dan belum dapat dimediasi melalui sarana-sarana komunikasi yang positif dan konstruktif, maka siklus pasang surut hubungan *magi—substansial—operasional* yang penuh lika-liku negatif akan selalu berulang.

SIMPULAN

Dilema etnis Tionghoa di merupakan salah satu contoh kasus dari tantangan (bencana) sosial yang terjadi di Indonesia. Dilema terjadi karena adanya hubungan atau interaksi antara individu maupun kelompok dengan penguasa yang mengalami pasasan surut dan ketegangan yang telah berlangsung cukup lama yang melibatkan dinamika proses kebudayaan yang meliputi aspek ideologi, eksistensi, dan operasional. Ketiga aspek tersebut saling memberi respon dan tarik ulur sehingga menghasilkan suatu strategi sebagai *middle man* yang dianggap sebagai pilihan terbaik dalam menyikapi tantangan sosial yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati. 1994. *Komunitas Tionghoa Di Surabaya 1910—1946*. Semarang: Mesias.
- Die, Ong Eng. 1979. “Peranan Orang Tionghoa Dalam Perdagangan.” In *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, edited by Melly G Tan, Gramedia, 30. Jakarta.
- Djie, Liem Twan. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina Di Jawa: Suatu Sttudi Ekonomi*. Jakarta: KITLV dan Gramedia.
- Haris, Tawalinuddin, and Isman Pratama Nasution. 1999. “Pengaruh Cina Pada Situs Dan Peninggalan Arkeologi Di Pesisir Utara Dan Madura.” Depok.
- Harsojo. 1977. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heidhues, Mary Somers. 1996. “Chinese Settlements in Rural Southeast Asia: Unwritten Stories.” In *Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and The Chinese in Honour of Jennifer Cushman*, edited by Anthony Reid, 1644--182. Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen and Unwin.
- Ihromi, T.O. 2006. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lohanda, Mona. 2001. *The Kapitan Cina of Batavia 1837—1942. 2nd Edition*. Jakarta:

KITLV.

- Onghokham. 1991. *Rakyat Dan Negara*. Jakarta: LP3ES.
- . 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Peursen, C.A Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwanto, Hari. 2005. *Orang Cina Khek Dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.
- Reid, Anthony. 1996. "Flows and Seepages in the Long-Term Chinese Interaction with Southeast Asia in Honour of Jennifer Cushman." In *Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese*, edited by Anthony Reid, 15--50. Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen and Unwin.
- Rusyanti. 2006. "Pecinan Kuno Di Kota Cirebon. Skripsi Sarjana." Universitas Indonesia.
- . 2012. "Rekonstruksi Sejarah Pecinan Jamblang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Data Arkeologis Dan Catatan Berhuruf Tionghoa Pada Dinding Klenteng Hok Tek Ceng Sin." *Jurnal Purbawidya* Vol.1 (No. 1): 91--108.
<https://doi.org/10.24164/pw.v1i1.12>.
- . 2013. "Peranan Tan Sam Cai Kong Dalam Sejarah Cirebon." *Jurnal Purbawidya* 2 (1): 105--117. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24164/pw.v2i1.35](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24164/pw.v2i1.35).
- Setiono, Benny G. 2003. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa Terj. Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China: A Study of Perceptions and Policies*. Jakarta: PT Grafiti Press.
- . 1999. "Negara Dan Minoritas Tionghoa Di Indonesia." *Jurnal Wacana* 1 (2): 223--247.
- . 2007. *Understanding the Ethnic Chinese in Southeast Asia*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Wang Gungwu. 1991. "Kajian Tentang Identitas Orang Cina Asia Tenggara." In *Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara*, edited by Jennifer Cushman and Wang Gungwu, 36--37. Jakarta: Grafiti.
- Widodo, Johannes. 1994. "The Role of Chinese in the Urban Development of Southeast Asian Coastal Cities: A Historical Study of the Architectural of the City During Colonial Periods." Tokyo.
- . 1996. "The Urban History of The Southeast Asian Coastal Cities (Particularly from 14th Century until Mid 20-Century)." University of Tokyo.

HASIL DISKUSI

Tidak Ada Pertanyaan